

SUARA AKADEMIK

Giliran KPK Ke Batubara



H. Erwan Efendi

MASYARAKAT menyambut baik dan bahkan mendukung penuh sikap tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak pelaku korupsi tanpa melihat latar belakang. Kita juga sepakat kalau para pelaku korupsi dihukum berat, memiskinkannya dan mencabut hak politiknya sebagai warga negara selama rentang waktu tertentu. Dengan begitu, bagi mereka yang mempunyai peluang untuk mencuri uang

negara akan berfikir seribu kali.

Dalam rentang waktu tidak berapa lama, sudah tiga pejabat di negeri ini menjadi tersangka dan bahkan sudah ditangkap KPK, yakni Bupati Bogor Rachmat Yasin, Walikota Makasar Ilham Arief Sirajuddin dan Menteri Agama RI Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka. Kita yakin masih banyak lagi kepala daerah/walikota yang akan menjadi korban termasuk mungkin di Batubara, Sumatera Utara.

Kalangan elit politik menilai kebijakan KPK menyadikan SDA sebagai tersangka korupsi dana haji yang merugikan negara sebesar Rp.100 miliar sangat bernuansa politik. Karena SDA sebagai orang pertama di jajaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menentukan sikap berkoalisi dengan Prabowo sebagai calon Presiden. Sementara dari perspektif jumlah kerugian negara, kebijakan KPK itu terkesan tebang pilih.

Anggapan politik atau tebang pilih mungkin benar mungkin juga tidak. Tetapi, secara empiris dengan pendekatan nilai kerugian, kebijakan KPK memang mengesankan adanya tebang pilih alias pilih kasih. Mengapa tidak? Jika dibanding dengan kerugian negara berdasarkan iktisar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2013, Kabupaten Batubara adalah terkorup nomor tiga di Sumut dengan kerugian negara sebesar Rp. 73.181.710.000. Kemudian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut juga melansir tahun 2013 lima besar daerah terkorup di Sumut, Kabupaten Batubara menempati urutan pertama dengan kerugian negara mencapai Rp. 226 miliar. Jadi, total kerugian negara selama anggaran tahun 2013 di Batubara akibat korupsi mencapai Rp. 299.181.710.000.

Dari perspektif nilai kerugian negara, keputusan KPK menangkap Bupati Bogor karena memerkaya diri dengan mengorupsi uang negara Rp. 4,5 miliar, Walikota Makasar mengorupsi Rp. 38,1 miliar serta menjadikan SDA sebagai tersangka dengan kerugian negara hanya Rp. 100 miliar dibanding dengan kerugian negara di Kabupaten Batubara Rp. 299.181.710.000, tentu semakin menguatkan anggapan bahwa KPK tebang pilih dalam menangani tindak kejahatan pencurian uang negara. Harusnya yang menjadi target adalah Kabupaten Batubara. Dari nilai itu pula tidak mungkin kalau KPK tidak mengusut kasus korupsi di Batubara, dan dari pernyataan BPK dan FITRA itu pula merupakan tangga dan pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri terjadinya korupsi di kabupaten yang baru delapan tahun menjalani pemekaran itu.

Kita berharap dalam menangani kasus pencurian uang negara, KPK sebaiknya melakukan pendekatan dengan nilai atau jumlah kerugian negara bukan siapa yang duluan mengadu atau pengaduan siapa yang pertama diterima. Nilai terbesar harus menjadi prioritas pertama untuk diusut dan selanjutnya nilai terbesar ke dua dan seterusnya. Karenanya, jika KPK bekerja berdasarkan pendekatan nilai kerugian negara, mestinya Kabupaten Batubara menjadi prioritas utama, hal ini mengingat apa yang dicuri oleh Bupati Bogor, Walikota Makasar dan bahkan SDA nilainya jauh lebih kecil dibanding uang negara yang di curi di Kabupaten Batubara.

Tanpa menafikan eksistensi penegak hukum lainnya di negeri ini, khusus dalam menangani kasus korupsi yang sudah semakin sistematis dan seperti telah menjadi budaya. Masyarakat Batubara mempunyai harapan dan beranggapan satu-satunya institusi yang mampu menangani kasus korupsi di Kabupaten Batubara adalah KPK.

Sudah berulang kali para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengadukan berbagai kasus korupsi di Batubara ke KPK, dari mulai kelas kecil hingga kakap, termasuk ke penegak hukum di daerah, namun belum membuahkan hasil sebagaimana harapan. Masyarakat Batubara optimis jika kasus pencurian uang negara di Batubara segera ditangani oleh KPK, kerugian negara sebesar Rp. 299.181.710.000 dapat kembali ke kas negara dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat bukan memerkaya diri sendiri, keluarga, teman dan sahabat.

Hampir lima tahun masyarakat Batubara bersabar menunggu tangan KPK untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi di kabupaten itu. Kini saatnya giliran KPK ke Batubara, dan masyarakat berharap tahun 2014 kasus korupsi di Batubara sudah berada di tangan KPK. Semoga.